

**PENGARUH ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN MENJADI
NON PERTANIAN TERHADAP KETAHANAN PANGAN
MASYARAKAT DI KECAMATAN NGEMPLAK
KABUPATEN BOYOLALI**

Skripsi
Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan



Oleh :

BAMBANG SUMARSONO
NIM. 04132085/M

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2008**

INTISARI

Kebijakan pembangunan pertanahan di atas tanah yang luasnya relatif tetap, namun pertambahan penduduk dan perkembangan wilayah secara terus menerus menuntut tercukupinya kebutuhan pembangunan yang memerlukan tanah. Akibatnya terjadi pergeseran pola penggunaan tanah dari tanah pertanian menjadi non pertanian, dengan terjadinya alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian untuk pembangunan perumahan dan permukiman akan mengurangi eksistensi tanah pertanian tersebut yang merupakan penghasil beras sebagai makanan pokok masyarakat di Kabupaten Boyolali. Pemerintah Kabupaten Boyolali dihadapkan pada benturan kepentingan terhadap pembangunan perumahan dan permukiman yang semakin meningkat serta amanat pelaksanaan ketahanan pangan dalam hal ini ketersediaan, kebutuhan konsumsi beras di wilayah Kecamatan Ngemplak. Terjadinya alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian berpengaruh terhadap ketahanan pangan dengan mengingat wilayah Kecamatan Ngemplak merupakan daerah lumbung beras untuk Kabupaten Boyolali maka akan berakibat pada berkurangnya jumlah produksi beras yang dibutuhkan bagi masyarakat di kecamatan Ngemplak pada khususnya dan seluruh masyarakat Kabupaten Boyolali pada umumnya. Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara luas alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian secara akumulatif terhadap ketahanan pangan terkait produksi beras secara akumulatif maka perlu diadakan penelitian. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian, pengaruh antara luas alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian terhadap ketahanan pangan, serta kebijakan instansi yang berwenang terhadap peran alih fungsi tanah pertanian tersebut di Kecamatan Ngemplak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian survai untuk maksud penjelasan (*explanatory*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: wawancara, dan studi dokumentasi. Pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, diambil sampel 120 responden. Analisis datanya menggunakan deskriptif kualitatif untuk menjawab faktor penyebab alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian dan kebijakan instansi terkait dengan pengendalian alih fungsi. Uji statistik korelasi regresi sederhana dengan variabel produksi beras (X) dan luas alih fungsi tanah pertanian (Y) secara kumulatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian adalah faktor eksternal yang meliputi tekanan penduduk, adanya lingkungan siap bangun dan faktor internal berupa alasan ekonomi serta alih profesi pekerjaan. Besarnya pengaruh alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian terhadap ketahanan pangan di Kecamatan Ngemplak adalah 94,8%, setelah dilakukan analisis dapat diketahui nilai $R = 0,973$ pengaruh luas alih fungsi tanah pertanian terhadap produksi beras sangat kuat. $F_{hitung} = 54,200$ sedangkan $F_{tabel} = 10,13$ berarti hubungan antara luas alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian terhadap produksi beras signifikan. $P\ value < \alpha$ yakni sebesar $= 0,005$ yang bermakna hasil uji F yang menyatakan bahwa hubungan antara luas alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian terhadap produksi beras signifikan adalah benar. Kebijakan instansi yang berwenang terkait alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian di Kecamatan Ngemplak masih bersifat kuratif dan belum dilaksanakan kebijakan secara preventif

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Pembatasan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	7
A. Tinjauan Pustaka.....	7
1. Alih Fungsi Tanah Pertanian.....	7
2. Produksi Beras.....	11
3. Ketahanan Pangan.....	13
B. Kerangka Pemikiran.....	14
C. Hipotesis.....	19

D. Definisi Operasional.....	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Lokasi Penelitian.....	25
C. Populasi dan Sampel.....	26
D. Variabel dan Indikator.....	27
E. Jenis dan Sumber Data.....	29
F. Teknik Pengumpulan Data.....	31
G. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	36
A. Keadaan Wilayah Kecamatan Ngemplak.....	36
1. Letak Wilayah dan Administrasi.....	36
2. Luas Wilayah.....	36
3. Kondisi Fisik.....	37
4. Penggunaan Tanah.....	38
5. Pertumbuhan Penduduk.....	41
6. Tanah Pertanian Berdasarkan Sistem Pengairannya	43
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Hasil Penelitian.....	45
1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian Di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali.....	45

2. Pengaruh Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian terhadap Ketahanan Pangan.....	51
3. Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian.....	58
BAB VI PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
DAFTAR PERATURAN.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah sebagai salah satu komponen ekosistem merupakan wahana bagi kehidupan terutama manusia baik sebagai tempat tinggal maupun tempat usaha. Tanah digunakan untuk bermacam-macam kegiatan antara lain, untuk pertanian, pembangunan perumahan dan permukiman serta industri. Penggunaan tanah yang diusahakan oleh manusia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup atas pangan, papan dan sandang.

Pertumbuhan jumlah penduduk menyebabkan terjadinya peningkatan kebutuhan hidup terutama pangan dan papan. Pemenuhan terhadap kebutuhan pangan diusahakan dengan peningkatan produksi pertanian terutama beras. Peningkatan produksi beras sebagai penopang bagi kebutuhan pangan diperlukan tersedianya tanah pertanian yang luas dan subur. Kebutuhan utama manusia yang lain berupa papan, untuk memenuhi kebutuhan papan diperlukan tersedianya tanah yang lokasinya cukup strategis. Kategori strategis tersebut antara lain dekat pusat pemerintahan, terdapat akses jalan, topografi wilayah yang relatif datar.

Tanah strategis tersebut salah satu penggunaannya berupa tanah pertanian produktif, sehingga tanah pertanian produktif yang

strategis merupakan objek pembangunan yang akan mengakibatkan alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian (Tanjung Nugroho, dkk, 2006:7)

Alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian dapat dilakukan secara massal oleh pemerintah, seperti pembangunan perumahan dan permukiman. Kondisi seperti ini jika terus dibiarkan akan mengancam eksistensi tanah pertanian yang merupakan penghasil beras sebagai makanan pokok mayoritas penduduk Indonesia.

Proses alih fungsi tanah pada dasarnya dapat dipandang sebagai suatu bentuk konsekuensi logis dari adanya pertumbuhan dan transformasi perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat yang sedang berkembang. Perkembangan yang dimaksud tercermin dari adanya (1) pertumbuhan aktifitas pemanfaatan sumberdaya alam akibat meningkatnya permintaan kebutuhan terhadap penggunaan tanah sebagai dampak peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan per kapita, serta (2) adanya pergeseran kontribusi sektor-sektor pembangunan dari sektor primer khususnya sektor pertanian ke aktifitas sektor sekunder (manufaktur) dan tersier (jasa). Di dalam hukum ekonomi pasar, alih fungsi tanah berlangsung dari aktifitas dengan land rent yang lebih rendah ke aktifitas dengan land rent yang lebih tinggi, dimana land rent diartikan sebagai nilai

keuntungan yang lebih bersih dari aktifitas pemanfaatan tanah per satuan luas tanah dan waktu tertentu (Supiandi Sabiham; 2007:14).

Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dalam memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakatnya melaksanakan program pembangunan perumahan dan permukiman secara massal. Dasar pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman adalah Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Permukiman Nomor 4/KPTS/ M/1999 tentang Kebijakan dan strategi Nasional Perumahan dan Permukiman. Pembangunan perumahan dan permukiman oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dilaksanakan di wilayah Kecamatan Ngemplak dengan *target* 32.261 unit sampai dengan tahun 2010.

Lokasi yang dijadikan sebagai obyek pembangunan perumahan dan permukiman secara massal terletak di wilayah Kecamatan Ngemplak merupakan tanah pertanian. Pembangunan perumahan dan permukiman secara massal oleh Pemerintah Daerah Boyolali juga diikuti pembangunan perumahan oleh pihak swasta (*developer*) dan pembangunan perumahan secara konvensional oleh masyarakat.

Pembangunan perumahan dan permukiman yang dilaksanakan diatas tanah pertanian seperti yang terjadi di Kecamatan Ngemplak tersebut, mengakibatkan terjadinya penyusutan luas tanah pertanian. Menyusutnya luas tanah pertanian

ini dapat menjadi penyebab menurunnya jumlah produksi beras di wilayah Kecamatan Ngemplak. Menurunnya jumlah produksi beras ini, berpengaruh terhadap tingkat kemampuan ketahanan pangan.

Untuk mewadai adanya alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian terhadap ketahanan pangan, penulis membuat dalam suatu judul penelitian:

“Pengaruh Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan Masyarakat Di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali.”

B. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat adalah :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali?
2. Seberapa besar pengaruh luas alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian terhadap ketahanan pangan di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali?
3. Bagaimana kebijakan instansi yang berwenang dalam mengendalikan alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali?

C. Pembatasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu, biaya dan kemampuan penulis dengan tidak mengesampingkan keakuratan dan kejelasan permasalahan, maka perlu dibatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu ketahanan pangan dalam penelitian ini hanya dilihat dari berkurangnya produksi beras sebagai akibat alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah
 - a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali.
 - b. Untuk mengetahui besarnya pengaruh luas alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian terhadap ketahanan pangan di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali.
 - c. Untuk mengetahui kebijakan instansi yang berwenang terhadap peran alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali.

2. Kegunaan Penelitian ini adalah:

a. Ilmu Pengetahuan

Untuk memberikan masukan kepada ilmu pengetahuan tentang pengaruh alih fungsi tanah pertanian terhadap ketahanan pangan.

b. Bagi praktek operasional memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berwenang dalam membuat kebijakan tentang pengaruh alih fungsi tanah pertanian terhadap ketahanan pangan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor Penyebab terjadinya alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian di wilayah kecamatan Ngemplak adalah ;

a. Faktor eksternal, meliputi :

- 1) tekanan penduduk (TP) di Kecamatan Ngemplak yang menyebabkan terjadinya alih fungsi tanah pertanian menjadi permukiman dalam pembahasan ini digunakan istilah kebutuhan rumah.
- 2) pembangunan fasilitas kehidupan, dalam hal ini adalah Lingkungan Siap Bangun (LISIBA) di Kecamatan Ngemplak

b. Faktor internal, meliputi :

- 1) alasan ekonomi berupa keinginan untuk mendapat penghasilan lebih besar dibandingkan bertani dengan cara mengubah penggunaan tanah dari pertanian menjadi tempat usaha.
- 2) alih profesi pekerjaan dari petani menjadi non petani sehingga tanah yang sebelumnya dipergunakan untuk usaha pertanian diubah penggunaannya menjadi usaha non pertanian.

2. Besarnya pengaruh alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian terhadap ketahanan pangan di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 adalah 94,8%.
3. Kebijakan instansi yang berwenang dalam mengendalikan alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali adalah:
 - a. lebih selektif dengan pemberian ijin perubahan penggunaan tanah.
 - b. rencana pembangunan perumahan dan permukiman dialokasikan pada tanah-tanah non pertanian.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil pembahasan tentang hubungan antara tekanan penduduk (TP) dengan alih fungsi tanah di Kecamatan Ngemplak $TP > 1$ yang berarti tekanan penduduk melebihi kapasitas tanah yang tersedia, disarankan agar program keluarga berencana di Kecamatan Ngemplak lebih digalakkan untuk menekan pertumbuhan penduduk.
2. Untuk meminimalisasi alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian di Kecamatan Ngemplak, instansi yang berwenang dalam mengendalikan hal ini seharusnya memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian tanpa ijin.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta.Jakarta.
- Budihardjo, Eko, 1997. Tata Ruang Perkotaan. PT ALUMNI. Bandung.
- Hamidi, 2004. Metode Penelitian Kuantitatif, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang
- Kartasapoetra,A.G. 1988. Pengantar Ekonomi Produksi Pertanian. Bina Aksara. Jakarta.
- Menteri Pertanian Republik Indonesia, 2006 dalam; Seminar Multifungsi dan Revitalisasi Pertanian di Bogor 27-28 Juni 2006.
- Moleong,Lexy J, 2000. Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Narbuko, Cholid & Achmadi, Abu, 2004. Metodologi Penelitian. PT Bumi Aksara
- Nawawi, Hadari. 1991. Metodologi Penelitian, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Nazir,Moh, 2005. Metode Penelitian.Ghalia Indonesia.Bogor.
- Nugroho,Tanjung; 2006."Perubahan Paradigma kebijakan Pendaftaran Tanah Untuk Mengimplementasikan Jiwa-Semangat UUPA dan Meningkatkan Governance", artikel 46 Tahun UUPA Yogyakarta; STPN.

Pusat Studi Kebijakan Pangan dan Gizi Institut Pertanian Bogor, 2002
(PSKPG IPB) dan Pusat Pengembangan Ketersediaan Badan
Bimbingan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian

Sabiham,Supiandi, 2007 "Manajemen Lahan Menuju Ketahanan Pangan
Nasional Dalam Bingkai Kebijakan Pertanahan" dalam Diskusi
Pertanahan dan Stadium General Sekolah Tinggi Pertanahan
Nasional 27 Februari 2007, Yogyakarta.

Sastraatmadja,Entang.2006.Petani Di Tanah Merdeka.Petani Center.Bogor

Singarimbun,Masri, 1989. Metode Penelitian Survei. LP3ES. Yogyakarta.

Sugiyono. 2002, Statistika Untuk Penelitian, CV Alfabeta, Bandung

Syafa'at,Nizwar; dkk, 2005. Pertanian Menjawab Tantangan Ekonomi
Nasional. Laper Pustaka Utama. Yogyakarta.

DAFTAR PERATURAN

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, (Amandemen ke IV)
_____ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
_____ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, Tentang
Perumahan Dan Permukiman
_____ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, Tentang
Pangan
_____ Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002
Tentang Ketahanan Pangan
_____ Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang
Penatagunaan Tanah
_____ Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
_____ Keputusan Menteri Negara Perumahan Dan
Permukiman Nomor 4 Tahun 1999, Tentang Kebijakan Dan Strategi
Nasional Perumahan Dan Permukiman